

Mitigasi Perubahan Iklim di Asia Tenggara: Peran Normatif ASEAN pada Negara melalui ASEAN Community Vision 2025

Riana Mardila & Muhammad Farhan Fadilla
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Perubahan iklim merupakan tantangan utama yang dihadapi kawasan Asia Tenggara, yang mencakup peningkatan suhu ekstrem, banjir, dan kebakaran hutan. Sebagai salah satu wilayah yang paling rentan, ASEAN berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim melalui kerangka ASEAN Community Vision 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran normatif ASEAN terhadap negara dalam mitigasi perubahan iklim pada periode 2015-2020 dengan menggunakan teori peran organisasi internasional oleh Karen A. Mingst. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berdasarkan data sekunder, seperti dokumen resmi ASEAN, laporan internasional, dan artikel akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN memainkan tiga peran normatif pada negara (anggota): selaku arsitek dari kerangka mitigasi, peneliti dan pelapor akan penguatan kapasitas, serta inisiator dari platform kolaboratif antar negara (anggota maupun partner non anggota). Pada akhirnya ASEAN melalui ACV 2025 telah menunjukkan kelembagaan yang kokoh untuk upaya mitigasi perubahan iklim ini. Namun, faktor seperti kurangnya mekanisme sanksi, kesenjangan antara knowledge production dan policy action, dan belum adanya kebijakan yang terintegrasi di berbagai lini, terlihat seperti kelemahan yang dapat menjadi tantangan untuk pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim ini pada tahap selanjutnya.

Kata Kunci: ASEAN; Perubahan Iklim; ASEAN Community Vision 2025; Peran Organisasi Internasional; Kebijakan Regional.

Abstract

Climate change is a major challenge facing the Southeast Asian region, including rising extreme temperatures, floods, and forest fires. As one of the most vulnerable regions, ASEAN plays a vital role in climate change mitigation through the ASEAN Community Vision 2025 framework. This study aims to analyze ASEAN's normative role toward states in climate change mitigation during the 2015–2020 period by applying the theory of international organizations' roles developed by Karen A. Mingst. This research uses a qualitative descriptive-analytical approach based on secondary data, such as official ASEAN documents, international reports, and academic articles. The findings indicate that ASEAN plays three normative roles toward its member states: as an architect of the mitigation framework, as a researcher and reporter of capacity enhancement, and as an initiator of collaborative platforms among member and non-member states. Ultimately, through the ACV 2025, ASEAN has demonstrated strong institutionalization in its efforts to mitigate climate change. However, factors such as the lack of sanction mechanisms, the gap between knowledge production and policy action, and the absence of integrated policies across sectors appear to be weaknesses that may challenge the implementation of climate change mitigation efforts in the next phase.

Keywords: ASEAN; Climate Change; ASEAN Community Vision 2025; Roles International Organization; Regional Policy.

Latar Belakang

Saat ini, perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global yang mendesak dan kompleks. Ia memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial, baik di tingkat lokal-nasional, regional, hingga global. Beberapa isu utama yang timbul akibat perubahan iklim adalah kenaikan permukaan air laut, peningkatan suhu, dan kebakaran hutan. Berdasarkan data dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), sejak tahun 1880, permukaan air laut secara global telah meningkat antara 21 hingga 24 sentimeter (Lindsey 2023). Hal ini berkontribusi pada fenomena-fenomena perubahan iklim yang lebih intens, seperti meningkatnya badai, erosi garis pantai, dan banjir. Selain itu, ancaman kebakaran hutan juga semakin serius. MacCarthy et al. (2023) dalam laporan data (Tyukavina et al. 2022) dari University of Maryland menunjukkan bahwa area yang terpengaruh oleh kebakaran hutan meningkat 5,4% setiap tahun, mencakup lebih dari 6 juta hektar tambahan dibandingkan tahun 2001. Salah satu penyebab utama dari fenomena ini adalah peningkatan suhu yang signifikan. Menurut NOAA, rata-rata suhu Bumi mengalami kenaikan sebesar 0,06 derajat *Celsius* setiap dekade sejak tahun 1850, dan dalam sepuluh tahun terakhir, suhu Bumi selalu mencatat rekor tertinggi (Lindsey dan Dahlman 2024).

Langkah-langkah global telah diambil untuk mengatasi sekaligus menekan keparahan dari masalah-masalah ini. Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang menjadi media atas lahirnya perjanjian-perjanjian penting terkait iklim seperti *Kyoto Protocol* (UNFCCC 1997) dan *Paris Agreement* (UNFCCC 2015). UNFCCC sendiri berupaya untuk mencapai stabilitas konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah gangguan berbahaya akibat aktivitas manusia terhadap sistem iklim. Tingkat stabilitas ini harus dicapai dalam jangka waktu yang memungkinkan ekosistem beradaptasi secara alami namun tetap memastikan produksi pangan terjaga, dan pembangunan ekonomi berlangsung dan berkelanjutan.

Di kawasan regional seperti Asia Tenggara, perubahan iklim seperti peningkatan suhu rata-rata, intensitas cuaca ekstrem, dan kerusakan ekosistem telah berlangsung dan diperkirakan akan semakin memburuk hingga akhir abad ke-21 (Asian Development Bank 2009). Menurut Asian Development Bank (ADB) (2009), kawasan ini sangat rentan terlebih dengan banyaknya penduduk pesisir yang terdampak kenaikan permukaan air laut. Selain itu, perekonomian kawasan ini sangat bergantung pada sumber daya alam, seperti sektor pertanian dan kehutanan, yang juga terancam oleh perubahan iklim. Menurut Eckstein et al. (2016), dalam laporan *Global Climate Risk Index* menyebutkan bahwa negara-negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam adalah yang paling terdampak dalam 20 tahun terakhir. Sebagai tambahan, 25 kota paling

rentan terhadap kenaikan permukaan air laut di dunia adalah tujuh kota yang berada di Asia Tenggara, terutama pada negara Filipina. Namun, Indonesia diprediksi akan menjadi negara paling rentan terhadap banjir di wilayah pesisir, dengan dampak yang diperkirakan akan memengaruhi 5,9 juta orang setiap tahun pada tahun 2100. Saat ini pun, data dari World Bank (2021) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan kejadian banjir terbanyak di Asia Tenggara dalam sepuluh tahun terakhir, dengan perkiraan 4,2 juta orang akan terdampak antara tahun 2070 hingga 2100. Situasi ini akan semakin parah jika mencairnya es di Kutub Selatan terus berlangsung, yang akan meningkatkan permukaan air laut. Diperkirakan pada akhir abad ke-21, peningkatan permukaan air laut bisa mencapai antara 30 hingga 120 cm (The Climate Change Response Framework 2019).

Selama beberapa tahun terakhir, suhu di negara-negara Asia Tenggara juga meningkat drastis. Pada 1 Mei 2024, Filipina mencatat rekor suhu tertinggi sebesar 38,8 derajat *Celcius*, sementara Kamboja mencapai 43 derajat *Celcius*, yang merupakan suhu tertinggi dalam 170 tahun. Negara-negara seperti Laos dan Thailand juga mencatat suhu tertinggi masing-masing 42,9 dan 45,4 derajat *Celcius*. Peningkatan suhu ini menyebabkan gelombang panas (*heat wave*) sebesar 2,3 derajat *Celcius*, yang dapat meningkatkan risiko serangan panas (*heat stroke*) hingga sepuluh kali lipat dalam satu hingga dua tahun ke depan (World Weather Attribution 2023). Peningkatan suhu ekstrem ini juga berdampak pada kebakaran hutan dan lahan gambut, yang menyebabkan kabut asap di negara-negara Asia Tenggara. Meskipun Asia Tenggara memiliki 56% lahan gambut tropis, lebih dari tiga juta hektar lahan gambut di kawasan ini hilang akibat kebakaran, yang diperkirakan menyebabkan 1 hingga 2 miliar ton karbon dilepaskan ke atmosfer, mengakibatkan kabut asap di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand (ASEAN t.t.).

Laporan dari National Climate Assessment menunjukkan bahwa suhu di Asia Tenggara diprediksi akan meningkat antara 4,5 hingga 8,5 derajat Fahrenheit pada tahun 2085. Diperkirakan juga rata-rata 5 hingga 30 hari dalam setahun akan mengalami temperatur maksimum di atas 35 derajat *Celcius*. Risiko kebakaran hutan tahunan juga diperkirakan akan meningkat sebesar 20 hingga 80% pada akhir abad ini (The Climate Change Response Framework 2019). Pada akhirnya, ekosistem di kawasan ini akan mengalami dampak negatif dari perubahan iklim, yang dapat merusak hutan dan mendorong munculnya spesies invasif serta hama yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan hasil pertanian.

Masalah peningkatan gas rumah kaca juga menjadi isu utama pada negara anggota Association of Southeast Asian Nation (ASEAN). Ketergantungan pada bahan bakar fosil, seperti batu bara, menjadikan kawasan ini berpotensi sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar. Menurut data dari International Energy Agency (IEA) (International Energy Agency 2019), kebutuhan energi pada kawasan diperkirakan akan meningkat 66% pada tahun 2040, dengan peningkatan penggunaan batu bara sebesar 40% untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Ancaman lain akibat perubahan iklim di Asia Tenggara juga meliputi peningkatan intensitas badai, termasuk angin topan dan siklon tropis. Peningkatan suhu permukaan air laut di perairan sekitar Samudera Pasifik Barat dan Laut Cina Selatan menjadi sumber terbentuknya siklon tropis, ditambah dengan meningkatnya kelembapan yang disebabkan oleh perubahan iklim di kawasan ini, membuat Asia Tenggara menyumbang 30% dari siklon tropis yang terjadi di dunia (Tran et al. 2022).

ASEAN sendiri telah menyampaikan beberapa pernyataan resmi untuk merespon kemungkinan dampak perubahan iklim ini di beberapa forum, baik regional maupun global. Sebagai contoh, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2015, Malaysia, ASEAN mendeklarasikan sekaligus mengadopsi The Declaration on Institutionalizing The Resilience of ASEAN and Its Communities and Peoples to Disasters and Climate Change. Deklarasi ini berupaya untuk merespon perubahan iklim di Kawasan Asia Tenggara dengan meminta dan menghimbau negara anggota untuk mempercepat investasi di bidang pengurangan risiko bencana dan adaptasi yang difokuskan pada pengembangan bidang kesehatan, manajemen air, manajemen ekosistem, perencanaan ekonomi, pertanian, warisan budaya, pendidikan, infrastruktur dan konstruksi, transportasi dan telekomunikasi, serta resiko keuangan dan transfer (SDG Knowledge Hub 2015). Selain itu, terdapat pula pernyataan resmi yang disampaikan pada forum internasional seperti Conference of Parties (COP) 24 Polandia (2018) dan COP 27 Mesir (2022). Keduanya menyatakan bahwa ASEAN berkomitmen untuk terus berupaya mengimplementasikan Perjanjian Paris dan mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan, dan menyambut kolaborasi pendanaan iklim yang berkelanjutan (ASEAN 2018). Adanya pernyataan-pernyataan ini menjadi bukti bahwa ASEAN telah menyadari fenomena gejala perubahan iklim di kawasan dan berupaya memitigasinya baik dalam skala regional maupun global.

Secara internal kawasan, ASEAN juga berusaha untuk merangkul upaya mitigasi perubahan iklim dengan menjadikannya salah satu aspek pembahasan penting dalam *ASEAN Community Vision (ACV) 2025*. ACV 2025 merupakan kerangka atau peta jalan yang diadopsi pada 22 November 2015 dalam *ASEAN Summit* ke-21 di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai kelanjutan dari pendirian Komunitas ASEAN 2015 (Yani dan Montratama 2019), yang menjadi tonggak penting dalam integrasi regional di Asia Tenggara. ACV 2025 memuat visi umum sekaligus merupakan *master plan* ASEAN untuk menjadi kawasan yang lebih stabil, terintegrasi secara ekonomi, berwawasan keluar, berpusat pada masyarakat, serta bertanggungjawab sosial, selama 10 tahun mendatang hingga tahun 2025. Ia menjabarkan arah strategis ASEAN untuk membangun komunitas politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya yang kuat dan berkelanjutan. ACV 2025 mengembangkan pendekatan berbasis tiga pilar utama yang telah dirintis melalui Bali Concord II (2003) dan *ASEAN Charter* (2008). Ketiga pilar ini kemudian disusun ke dalam cetak biru (*blueprint*) yang pada ACV 2025 ini mengalami pembaharuan setelah *blueprint* sebelumnya yang telah lahir pada Roadmap for ASEAN Community 2009-2015 (ASEAN 2009). Ketiga pilar yang diterjemahkan dalam ketiga *blueprints* itu adalah ASEAN Political Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Dari ketiganya, ASCC menjadi pilar utama yang menangani isu perubahan iklim, dengan tujuan menciptakan komunitas yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan melalui perlindungan lingkungan, pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kapasitas adaptasi terhadap kerentanan sosial dan ekonomi (ASEAN Secretariat 2015). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ACV 2025 lebih berfungsi sebagai kerangka strategis yang bersifat normatif dimana nantinya akan diturunkan ke dalam program-program lebih spesifik, termasuk upaya mitigasi perubahan iklim tersebut.

Sebenarnya, ASEAN telah mengupayakan mitigasi perubahan iklim ini jauh sebelum adanya ACV 2025. Akan tetapi, program-program tersebut dirasa belum efektif sehingga terhenti ataupun mengalami pembaharuan di setiap periodenya. Program tersebut antara lain *ASEAN Sub-Regional Environment Programme (ASEP-I)* 1977, yang difasilitasi oleh UNEP dan diformalisasi dalam *ASEAN Ministerial Meeting on Environment (AMME)* pertama tahun 1981 (Sukanda 2003). Program ini berlanjut ke ASEP-II (1983–1988) dan ASEP-III (1988–1992) (Sukanda 2003), yang menekankan penguatan kapasitas negara anggota dalam pengelolaan lingkungan, konservasi alam, dan pendidikan lingkungan. Salah satu tonggak penting lainnya adalah *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)* yang ditandatangani pada 10 Juni 2002 dan berlaku sejak November 2003, sebagai bentuk komitmen kolektif mengatasi kebakaran hutan dan kabut asap lintas negara. Di samping itu, kerja sama seperti *EC-ASEAN COGEN Programme* (1996–2004) dan

EC-ASEAN Energy Facility (2002–2007) menunjukkan adanya kolaborasi internasional meski gagal menciptakan struktur kelembagaan yang berkelanjutan (Guangyu 2021). Kemudian pada tahun 2007 ASEAN mulai membentuk kerangka kelembagaan yang lebih serius yaitu *ASEAN Working Group on Climate Change* (AWGCC) dan akhirnya sampai pada ACV 2025 yang menandai transisi dari pendekatan sektoral ke integrasi isu iklim dalam agenda kawasan. Apabila sebelum ACV 2025, pendekatan ASEAN terhadap isu perubahan iklim masih bersifat sektoral dan teknis, dengan fokus utama pada kerja sama lingkungan umum seperti polusi, kebakaran hutan, dan energi, sebagaimana terlihat dalam program-program di atas, maka setelah ACV 2025 diperkenalkan, perubahan iklim di-arus-utamakan sebagai isu strategis lintas pilar komunitas ASEAN—politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini tercermin dalam dokumen penting seperti *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025*, *ASEAN Strategic Plan on Environment* (2016–2025), dan *ASEAN State of Climate Change Report* (2021), yang mendorong pendekatan yang lebih terkoordinasi dan selaras dengan agenda global seperti *Paris Agreement* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta memperkuat peran kelembagaan seperti AWGCC.

Menanggapi upaya mitigasi ini, masing-masing negara anggota ASEAN memasang target ambisius namun ternyata terdapat kesenjangan. Kamboja menargetkan dapat mencapai net-negatif pada tahun 2030. Malaysia menargetkan *net-zero emissions* pada tahun 2050 di mana target ini melampaui target negara lain seperti Indonesia yaitu pada tahun 2060, Laos di 2050, dan Singapura pada awal tahun setelah 2050 (Arino dan Prabhakar 2021). Akan tetapi, upaya ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam mengatasi perubahan iklim belum sepenuhnya efektif. Dalam pelaksanaannya sering terhambat oleh kendala-kendala seperti kurangnya koordinasi antar negara, ketidaktepatan implementasi kebijakan, dan keterbatasan sumber daya. Laporan *ASEAN State of Climate Change* menunjukkan bahwa target agregat penurunan emisi gas rumah kaca di kawasan ini pada tahun 2030 masih belum cukup untuk memenuhi target suhu dalam *Paris Agreement* (Arino dan Prabhakar 2021). Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Intergovernmental Panel on Climate Change 2021) yang dikutip oleh World Economic Forum (World Economic Forum 2021) menunjukkan bahwa meskipun negara-negara Asia Tenggara diperkirakan akan mengalami dampak paling parah dari perubahan iklim, sebagian besar negara di kawasan ini tidak memiliki strategi pengurangan karbon yang efektif untuk mengurangi risiko iklim yang diuraikan dalam laporan IPCC.

Ketidakkonsistenan antara ambisi yang ada pada masing-masing negara dan kebijakan yang diterapkan menjadi salah satu hambatan dalam menangani isu perubahan iklim. Misalnya, Indonesia, sebagai negara

dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, berencana mencapai *net-zero* pada tahun 2060, tetapi 60% energinya masih bergantung pada batu bara, yang merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar. Malaysia juga menyatakan akan mengurangi intensitas emisi sebesar 45% pada tahun 2030, namun berencana meningkatkan penggunaan batu bara (World Economic Forum 2021).

Pada aspek finansial, negara-negara di Asia Tenggara yang sebagian besar merupakan negara berkembang, menghadapi tantangan dari segi ekonomi. Mereka mengandalkan pendanaan iklim untuk mengatasi masalah yang sebagian besar disebabkan oleh negara-negara industri. Pada tahun 2009, negara-negara dengan ekonomi lebih baik berjanji untuk menyediakan pendanaan sebesar US\$100 miliar per tahun pada tahun 2020 untuk membantu negara-negara miskin yang rentan terhadap perubahan iklim. Namun, dalam praktiknya, janji tersebut belum terwujud (World Economic Forum 2021).

Dengan berbagai permasalahan yang mengancam Asia Tenggara, ASEAN melalui kerangka ACV, khususnya pada bagian *Socio and Cultural Community*, berupaya mengatasi masalah ini dengan membentuk sebuah kerangka kerja yang terintegrasi dengan kerangka iklim global, mengacu pada *Paris Agreement*. Dalam dokumen-dokumennya, ASEAN berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelaraskan target yang ada dalam *Paris Agreement*, menekankan pentingnya pelaporan dan pemantauan untuk sejalan dengan *Enhanced Transparency Network* (ETF), serta mencegah rata-rata kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celsius, bahkan hingga 1,5 derajat Celsius dibandingkan dengan tingkat pra-industri (ASEAN Secretariat 2021a).

Melihat ketimpangan upaya negara anggota dan target spesifik yang semakin dekat tempo pencapaiannya, yaitu tahun 2025, penelitian ini berupaya untuk menganalisa bagaimana peran ASEAN dalam memitigasi perubahan iklim melalui kerangka ACV 2025 periode 2015-2020. Periode ini menjadi fokus penelitian karena ACV 2025 ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap implementasi (2015-2020) dan tahap konsolidasi atau penguatan (2021-2025) (Ministry of Foreign Affairs, Malaysia t.t.). Sehingga dengan alasan tersebut, penelitian ini ingin membahas bagaimana pelaksanaan dari tahap implementasi tersebut terutama upaya normatif ASEAN pada negara (anggota) melalui ACV 2025 ini dalam upaya memitigasi perubahan iklim di kawasan Asia Tenggara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji peran atau upaya normatif ASEAN dalam memitigasi perubahan iklim melalui kerangka ACV 2025 pada periode 2015-2020. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk memberikan gambaran mengenai proses ASEAN dalam mengupayakan pemitigasian perubahan iklim yang dimulai dengan pembuatan dan pembiasaan norma di kawasan Asia Tenggara, khususnya norma-norma yang dibangun untuk negara (anggota). Nantinya, upaya ini akan dikaji dalam kerangka Teori Peran Organisasi Internasional oleh Karen A. Mingst dan Ivan M. Arreguín-Toft dalam bukunya yang berjudul *Essentials of International Relations* (2016). Setelah penjabaran, penelitian ini juga akan mengevaluasi upaya-upaya normatif tersebut. Teori tersebut terdiri dari 3 level analisis, antara lain sistem internasional, negara, dan individu. Secara khusus, penelitian ini akan berfokus pada level negara saja untuk mendeskripsikan upaya-upaya normatif yang secara langsung melibatkan negara.

Penelitian ini sepenuhnya bergantung pada data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya. Data yang digunakan meliputi pertama, dokumen resmi ASEAN, seperti laporan tahunan, deklarasi, dan keputusan yang relevan dengan implementasi ACV 2025 dan kebijakan perubahan iklim. Kedua, artikel jurnal akademik, yang membahas peran ASEAN dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Ketiga, laporan dari lembaga regional dan internasional, termasuk laporan dari ADB, IPCC, dan organisasi terkait lainnya. Keempat, berita online dan publikasi media, untuk melacak dinamika implementasi kebijakan dan respons negara anggota ASEAN terhadap kerangka mitigasi perubahan iklim. Kelima, laporan pilar sosial-budaya ASEAN, yang terkait dengan kerangka kerja mitigasi perubahan iklim sesuai dengan ACV 2025.

Kerangka Teori

Organisasi Internasional (OI) adalah lembaga yang terdiri atas minimal tiga negara anggota, berkegiatan di beberapa negara dan setiap negara anggota terikat pada suatu perjanjian formal (Mingst dan Arreguín-Toft 2016). Secara umum, setidaknya terdapat 3 teori besar terkait peran OI, yaitu Karen A. Mingst (2016), Clive Archer (2001), dan Harold Jacobson (1979). Kerangka Mingst digunakan untuk menyoroti sisi normatif dari OI, termasuk bagaimana ASEAN mendorong terbentuknya norma keberlanjutan di kawasan dan mendorong negara-negara anggotanya untuk berkomitmen pada perjanjian internasional seperti Paris Agreement. Archer memberikan aspek peran operasional dari OI tentang bagaimana ASEAN bertindak sebagai arena bagi negara-negara anggotanya untuk

berkolaborasi dan menyepakati kebijakan lingkungan. Sedangkan Jacobson, akan menunjukkan peran institusional dari ASEAN tentang bagaimana ASEAN mengawasi implementasi kebijakan terkait perubahan iklim di kawasan. Meskipun begitu, penelitian ini akan berfokus pada peran normatif dari ASEAN melalui ACV 2025 dalam upaya memitigasi perubahan iklim di kawasan Asia Tenggara, yang akan dibingkai dalam kerangka Peran OI oleh Karen A.Mingst.

Secara rinci, Mingst (Mingst dan Arreguín-Toft 2016) membagi peran atau fungsi OI ke dalam 3 kelompok. Pertama, fungsi atau peran OI pada sistem internasional. Pada level ini, OI berkontribusi untuk membangun kebiasaan bekerja sama. Misalnya, negara-negara menjadi lebih sering bersosialisasi seperti yang terjadi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), dan di OI lainnya. OI juga sekaligus berfungsi untuk mengembangkan prosedur membuat peraturan dan menyelesaikan permasalahan. Kedua, peran OI bagi negara adalah memperluas peluang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri. Selain itu, OI berperan sebagai wadah bagi negara-negara untuk menyuarakan kepentingan dan berkomunikasi dengan pihak lain, serta memengaruhi perilaku negara dalam mengambil kebijakan tertentu. Ketiga, peran OI bagi individu, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada individu dalam hal kepemimpinan. Saat bekerja di organisasi internasional, individu dapat berinteraksi dan bekerja sama secara global, seolah mewakili negara. Individu-individu di sini diharapkan untuk tidak hanya dapat memberikan masukan kepada organisasi, dalam hal ini ASEAN, tapi juga dapat berdampak ke lingkungan atau masyarakat di mana mereka berada sekembalinya mereka ke masyarakat. Pada akhirnya, teori ini mengizinkan peneliti untuk mengkaji fungsi normatif ASEAN yang diindikasikan dengan ada tidaknya upaya yang dilakukan ASEAN melalui ACV 2025 ini untuk menanamkan ide atau norma (kebiasaan) yang dilakukan baik pada ketiga level analisis tersebut, khususnya pada negara (anggota) yang menjadi fokus pada penelitian ini.

Hasil dan Diskusi

ASEAN sebagai organisasi regional tentunya tidak lepas dari tantangan global, termasuk perubahan iklim. Melalui ACV 2025, ASEAN berupaya mendorong komitmen kolektif untuk membangun kawasan yang tangguh terhadap krisis iklim. ACV 2025 juga menunjukkan upaya yang lebih terintegrasi dalam upaya pemitigasian perubahan iklim kawasan yang tadinya lebih bersifat sektoral atau khusus (kasus per kasus), sekarang dibahas secara lintas pilar, baik ekonomi, politik, dan sosial budaya, meskipun mitigasi perubahan iklim itu sendiri termasuk dalam pilar sosial budaya (ASCC Blueprint 2025). Studi ini menganalisis upaya, fungsi, atau peran normatif ASEAN dalam mitigasi perubahan iklim kawasan

mengacu pada teori Karen A. Mingst. Mingst menjelaskan bahwa untuk melihat upaya atau peran normatif sebuah organisasi internasional, ia dapat dilihat di tiga tempat: sistem internasional, negara (anggota), dan individu. Penelitian ini dikhususkan untuk melihat fungsi normatif ASEAN terhadap negara (saja).

Peran ASEAN Melalui ACV 2025 pada Negara (Anggota)

Dalam struktur kerja sama lingkungan ASEAN, terdapat tiga entitas utama dengan fungsi berbeda namun saling berkaitan, yaitu AMME, ASOEN, dan AWGCC. AMME merupakan forum tingkat menteri yang berperan menetapkan arah kebijakan dan prioritas regional di bidang lingkungan hidup. Di bawahnya, terdapat ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN) yang terdiri dari pejabat senior negara anggota dan bertugas mengoordinasikan implementasi kebijakan serta mengawasi kelompok kerja tematik. Salah satu kelompok kerja tersebut adalah AWGCC yang berfokus pada isu perubahan iklim, termasuk menyusun dan menjalankan inisiatif serta kerja sama regional dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ketiganya membentuk rantai koordinasi dari level kebijakan hingga teknis dalam tata kelola lingkungan ASEAN (International Institute for Sustainable Development 2010).

ASEAN melalui ACV 2025 selaku Arsitek dari Master Plan Mitigasi Perubahan Iklim Kawasan

Peran normatif ASEAN pada negara melalui ACV 2025 terkait mitigasi perubahan iklim adalah pertama, sebagai arsitek dari *master plan* upaya mitigasi perubahan iklim kawasan. Kita tahu bahwa ACV 2025 itu sendiri merupakan kerangka besar. Tetapi tidak sampai situ, ASEAN, dalam hal ini AMME yang dibantu ASOEN, merancang pembentukan *ASEAN Strategic Plan on Environment* (ASPEN) 2016-2025. ASPEN 2016-2025 diformulasikan dengan tujuh area strategis yang menjadi fokus dari ASEAN dalam bidang lingkungan. Salah satu diantara tujuh strategi prioritas yang terdapat di dalamnya adalah perubahan iklim dengan beberapa tujuan dan program utama yaitu adaptasi dan mitigasi, transfer teknologi, pendanaan iklim, koordinasi lintas sektor dan kemitraan global (ASEAN Secretariat 2020) ASPEN memberikan gambaran langkah kebijakan penting dari respon ASEAN untuk mendorong pendekatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang didasarkan pada norma umum (*common norm*). Selain itu, ASPEN juga mengadvokasi kebijakan terkait perubahan iklim melalui tujuh strategi prioritas yang menjadi landasan dari kelompok kerja iklim untuk membentuk langkah-langkah yang lebih spesifik lagi melalui *ASEAN Working Group on Climate Change Action Plan* (AWGCC Action Plan) 2019-2025 (Kaewkhunok 2023).

AWGCC Action Plan 2019-2025 berisikan proyek yang lebih detail dan spesifik (ASEAN Secretariat 2019) dengan yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan meningkatkan integrasi serta kolaborasi antara berbagai badan sektoral ASEAN, pemangku kepentingan terkait, dan mitra internasional. *AWGCC Action Plan* berisikan tema-tema utama yang menjadi fokus dari rencana aksi ini, diantaranya yaitu adaptasi perubahan iklim, asesmen *Nationally Determined Contribution* (NDC), pemodelan dan asesmen iklim, emisi gas rumah kaca, pembiayaan iklim dan pasar, koordinasi lintas sektor, dan transfer teknologi (ASEAN Secretariat 2019).

Pada adaptasi perubahan iklim pelatihan dan pembangunan kapasitas dengan hasil konkret masing-masing negara anggota dijadikan fokus utama. Dalam implementasinya, dibutuhkan penyesuaian terhadap kondisi dan prioritas masing-masing negara anggota. Beberapa yang menjadi area prioritas diantaranya: manajemen sumber daya air untuk banjir dan kekeringan, kelompok yang rentan, kesehatan, pertanian, keanekaragaman hayati, dan adaptasi berbasis ekosistem (dapat digabungkan menjadi satu isu), pengembangan ketahanan perkotaan, asesmen terhadap risiko dan kerentanan, serta pemantauan dan evaluasi (ASEAN Secretariat 2019). Ia juga difokuskan pada pendekatan yang menghasilkan hasil konkret dengan menyesuaikan kondisi masing-masing negara anggota. Beberapa diantaranya adalah seperti penyusunan praktik masing-masing negara anggota dalam melakukan mitigasi gas rumah kaca dari masing-masing sektor terkait dan penyelenggaraan lokakarya untuk menjadikan pengetahuan mengenai iklim sebagai pengetahuan umum pada setiap rencana kebijakan pemangku kebijakan (ASEAN Secretariat 2019).

Menurut laporan *ASEAN State of Climate Change Report* (ASCCR) sampai dengan tahun 2021, dampak dari upaya adaptasi seperti yang dirancang oleh AWGCC menjadikan negara-negara anggota ASEAN memiliki fokus kepada beberapa sektor utama untuk diidentifikasi dan memasukkannya ke dalam strategi adaptasi nasional pencegahan iklim masing-masing. Seluruh negara anggota ASEAN berfokus kepada makanan dan pertanian, sumber daya air, hutan dan keanekaragaman hayati, serta kesehatan dengan rincian 6 negara memfokuskan pada permukiman perkotaan dan energi, 3 negara anggota berfokus pada industri, infrastruktur dan perikanan, 2 negara berfokus pada transportasi, dan 1 negara berfokus pada mata pencaharian dan kemiskinan (ASEAN Secretariat 2021a). Setiap negara anggota berfokus kepada 3 sektor utama yaitu makanan dan pertanian, sumber daya air, hutan dan keanekaragaman hayati, serta kesehatan. Sedangkan untuk dampak mata pencaharian dan kemiskinan hanya Kamboja yang memasukkannya ke dalam prioritas nasional, lalu permukiman perkotaan Brunei, Myanmar, Malaysia, dan Filipina belum menjadikannya sebagai sektor utama yang perlu adaptasi

perubahan iklim. Selain itu, bagi negara-negara yang Produk Domestik Bruto (PDB)-nya terdampak dari sektor perikanan seperti Kamboja, Vietnam, Indonesia Filipina, Thailand, Laos, Malaysia dan Myanmar tetapi hanya beberapa negara yang menjadikan sektor perikanan sebagai prioritas untuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Lalu untuk sektor turisme hanya diidentifikasi oleh beberapa negara, tetapi negara-negara lain hanya menyebutkannya di dalam pernyataan nasionalnya (ASEAN Secretariat 2021a).

Aspek kedua yang menjadi pembahasan penting pada AWGCC Action Plan 2019-2025 adalah rencana jangka panjang dan asesmen terhadap NDC. Pelatihan dan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan pada tema ini mencakup beberapa area fokus, diantaranya tentang penerapan alat perencanaan dan metodologi, perumusan kebijakan, undang-undang dan kerangka hukum iklim, rancangan kerangka transparansi dan panduan asesmen terhadap NDC, dan teknologi-teknologi yang sudah ada (ASEAN Secretariat 2019). Kemudian, program-program pelatihan kepada komunitas pejabat pemerintah, pakar ilmiah, dan sektor swasta seperti kegiatan pemilihan indikator utama dalam melacak progres NDC serta berbagi data antar instansi. Langkah-langkah ini sejalan dengan *Paris Agreement Work Programme* untuk pembangunan jangka panjang dan strategi untuk mencapai rendah emisi (ASEAN Secretariat 2019). Untuk mencapai skenario global 1,5 derajat, ASEAN harus mencapai *net-zero* emisi CO₂ pada 2050 dan *net-zero* emisi gas rumah kaca pada tahun 2065. Tetapi, berdasarkan NDC terbaru tahun 2020-2021 yang diserahkan kepada ASCCR, target regional ASEAN belum mencapai batas yang ditetapkan sebesar 1,5-2 derajat (Qiu *et.al.* 2024). Pada laporan NDC 2021, semua negara anggota ASEAN kecuali Thailand, Myanmar dan Indonesia telah meningkatkan komitmen pengurangan emisi dari *Business as Usual* (BAU) mereka dengan membuat target baru melebihi target yang sudah ada. Target *unconditional* adalah target dimana negara dapat menargetkan untuk mencapai pengurangan emisi tanpa bantuan dari pihak eksternal dan target *conditional* adalah jika negara masih menargetkan pengurangan emisi dengan bergantung dari bantuan finansial pihak eksternal (United Nations Development Programme 2023).

Negara-negara anggota ASEAN telah memperbarui komitmen iklim mereka melalui dokumen NDC 2021, dengan tingkat ambisi yang bervariasi. Indonesia meningkatkan target pengurangan emisi dari 29% menjadi 31,89% secara tanpa syarat, dan dari 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030. Thailand juga menaikkan targetnya dari 20% menjadi 30% (*unconditional*) dan dari 25% menjadi 40% (*conditional*). Negara lain seperti Vietnam, Laos, dan Malaysia menunjukkan komitmen kuat, masing-masing menetapkan target pengurangan signifikan dan sasaran *net-zero* pada 2050. Sementara itu, Filipina menetapkan

target pengurangan emisi hingga 75% secara conditional, meskipun kontribusi unconditional-nya relatif kecil. Negara-negara seperti Brunei, Kamboja, dan Myanmar juga menyampaikan target ambisius, terutama melalui sektor kehutanan dan energi terbarukan. Pembaruan ini mencerminkan kesadaran kolektif ASEAN terhadap urgensi krisis iklim, meskipun masih terdapat kesenjangan antara kapasitas nasional dan tingkat ambisi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris (ASEAN Secretariat 2021a).

Selanjutnya, *AWGCC Action Plan 2019-2025* juga membahas mengenai kebutuhan akan peningkatan kapasitas pada bidang pemodelan iklim dan analisis data yang akan berkontribusi terhadap pemahaman dan model iklim secara menyeluruh. Hal ini berguna pada perumusan kebijakan dan perencanaan jangka panjang negara-negara anggota dalam bidang iklim. Beberapa cara untuk melakukan peningkatan kapasitas pada bagian ini adalah dengan pengembangan peta risiko dan kerentanan ASEAN, sistem peringatan dini serta laporan pengawasan iklim ASEAN tahunan.

Salah satu upaya utamanya adalah penyelenggaraan workshop *ASEAN Regional Climate Data, Analysis and Projections* (ARCDAP) yang dimulai sejak tahun 2018 oleh Centre for Climate Research Singapore (CCRS) dan *ASEAN Specialised Meteorological Centre* (ASMC), yang bertujuan memperkuat pemahaman kawasan terhadap variabilitas iklim, proses-proses iklim, serta validasi model iklim (CCRS 2018). Selain itu, pelatihan *Weather Prediction by Numerical Methods* (WPNM) juga telah dilaksanakan sejak 2019 untuk memperdalam pengetahuan teknis para ahli iklim ASEAN dalam prediksi cuaca numerik (CCRS 2019). Inisiatif lain yang signifikan adalah *Southeast Asia Climate Analysis and Modelling* (SEACAM), yang sebenarnya memang sudah dimulai sejak 2011 melalui kerja sama dengan UK Met Office Hadley Centre, guna mendorong kerja sama ilmiah dan membangun kapasitas penelitian di Asia Tenggara (CCRS dan UK Met Office Hadley Centre 2011). Dalam *AWGCC Action Plan 2019-2025* inisiatif ini terus dilaksanakan dan diperkuat. Sementara itu, Konferensi Kemitraan Perubahan Iklim ASEAN pada bulan Agustus 2019 menjadi wadah penting bagi negara-negara anggota untuk berbagi pengalaman, menyusun strategi jangka panjang, dan memperkuat koordinasi dalam isu-isu seperti sistem MRV (*Measuring, Reporting, Verification*), proyeksi iklim, serta pembiayaan iklim (JICA 2019). Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan komitmen ASEAN dalam memperkuat fondasi ilmiah dan kapasitas teknis dalam menghadapi perubahan iklim melalui kerja sama regional dan berbagi pengetahuan.

Selanjutnya, *AWGCC Action Plan* juga mengembangkan metode pengukuran, pelaporan dan verifikasi serta penilaian Emisi Gas Rumah Kaca. Pada tema ini memiliki keterkaitan dengan pengintegrasian dengan kerangka Perjanjian Paris yaitu pada proses evaluasi yang menggunakan panduan dan prosedur dari Perjanjian Paris dalam melakukan laporan di bawah *Enhanced Transparency Framework* (ETF). Negara-negara di ASEAN masih memiliki metode pengukuran, pelaporan dan verifikasi yang berbeda-beda, menyelaraskan metode-metode ini akan memberikan manfaat kepada ASEAN sebagai kawasan dalam hal transparansi, konsistensi dan perbandingan data yang dilaporkan. Selain itu, memahami persyaratan fundamental dari penetapan harga karbon, penyusunan peta jalan untuk meningkatkan kapasitas metode pengukuran, pelaporan dan verifikasi bagi masing-masing negara anggota (ASEAN Secretariat 2019). Selain itu, pelatihan ini juga dilaksanakan lintas sektor untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengintegrasikan pengetahuan dari setiap sektor itu sendiri.

Tema lainnya adalah pembiayaan iklim dan pasar. Akses terhadap pembiayaan iklim masih memiliki tantangan dalam hal keterbatasan pengetahuan, kurangnya asesmen terhadap kebutuhan yang dibutuhkan, dan ketidakmampuan memenuhi persyaratan pembiayaan iklim. Selain itu, belum adanya mekanisme koordinasi regional untuk mengakses pembiayaan iklim juga menjadikan sulitnya akses terhadap pembiayaan iklim (ASEAN Secretariat 2019). Oleh karena itu, dapat dilakukan pemetaan komprehensif untuk mengakses peluang pendanaan baik melalui sumber internasional maupun domestik, serta dukungan teknis kepada negara-negara anggota untuk mendapatkan akses pembiayaan iklim. Sehingga, dengan pembiayaan iklim yang baik dapat membangun kapasitas dan infrastruktur untuk mitigasi, adaptasi dan pengajuan proposal proyek (ASEAN Secretariat 2021a).

Menurut laporan ASCCR terbaru, negara-negara di ASEAN telah berhasil mengumpulkan 3,95 miliar dolar AS untuk pembiayaan iklim melalui pembiayaan bilateral, dimana 74% dialokasikan untuk mitigasi dan 15% untuk adaptasi, dimana alokasi terbanyak didapatkan oleh Kamboja, Malaysia, Myanmar dan Filipina dengan sektor energi masih menjadi sektor terbesar dengan alokasi lebih dari 3500 juta dolar AS dan diikuti dengan Agrikultur dan industri sebesar lebih 1500 juta dolar AS (ASEAN Secretariat 2021a).

Tema terakhir yang menjadi fokus bagi AWGCC adalah meningkatkan kolaborasi dengan pihak swasta dan pakar teknis pada area-area inti seperti pembangunan yang rendah karbon, peralihan ke praktik berkelanjutan, solusi berbasis ekosistem dan alam, pertanian cerdas iklim, serta

eksplorasi opsi energi terbarukan. Pada periode 2015–2020, AWGCC secara aktif mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan pakar teknis dalam berbagai inisiatif untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan praktik berkelanjutan. Misalnya, pada *ASEAN Climate Change Partnership Conference* pertama yang diselenggarakan pada Juni 2018 di Manila, berbagai proyek inovatif diperkenalkan, termasuk pengembangan pertukaran karbon berbasis blockchain di Singapura dan penelitian lahan gambut oleh National University of Singapore (Hanns Seidel Foundation 2018). Konferensi ini mempertemukan pemerintah, organisasi internasional, dan institusi akademik untuk bertukar ide dan menjajaki kerja sama dalam mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, pada Agustus 2019, konferensi serupa diadakan di Singapura dengan dukungan dari Hanns Seidel Foundation dan partisipasi berbagai mitra internasional seperti UNFCCC, GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*), dan JICA (*Japan International Cooperation Agency*). Konferensi ini membahas kebutuhan regional dalam pengembangan strategi jangka panjang, koordinasi lintas sektor, pembangunan kapasitas untuk sistem MRV, serta eksplorasi opsi energi terbarukan (JICA 2019).

Pada tingkat regional, juga sudah terbentuk kerja sama teknologi dengan pembentukan ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation (APASTI) 2016–2025 yang telah bertugas untuk mengidentifikasi dan mengembangkan model prediksi iklim, asesmen dampak iklim, mengumpulkan data iklim di regional dan memproses data serta bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal maupun swasta untuk meningkatkan kerja sama teknologi (ASEAN Secretariat 2021a). APASTI merupakan hasil Kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup Jepang bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) dan AWGCC pada tahun 2019. Beberapa kerja sama yang telah dihasilkan melalui APASTI seperti dalam bidang capacity building pengurangan emisi gas rumah kaca ASEAN-Jepang, lokakarya dalam bidang aplikasi iklim di ASEAN, serta pelaksanaan ASEAN Science and Technology Week (ASEAN Secretariat 2016).

ASEAN melalui ACV 2025 selaku Researcher dan Reporter

Peran normatif (kedua) ASEAN terhadap negara terkait mitigasi perubahan iklim melalui ACV 2025 adalah sebagai *researcher* sekaligus *reporter*. Hal ini ditandai dengan lahirnya ASCCR (ASEAN Center for Energy 2022). Laporan ini merupakan hasil kerjasama antara ASEAN dan Jepang melalui *platform* ASEAN Institute for Global Environmental Strategies (IGES) dengan bantuan dari pemerintah Jepang melalui Japan-ASEAN Foundation (JAIF) (ASEAN Secretariat 2021a).

Laporan ini memberikan gambaran mengenai status iklim terkini di kawasan dengan menunjukkan tindakan apa saja yang dapat ditingkatkan, dan mengidentifikasi peluang kerja sama untuk mendukung upaya ASEAN mencapai target transisi *net-zero* 2050. Ia bertujuan untuk meningkatkan pertukaran informasi dan keahlian, yang memungkinkan negara anggota ASEAN menyelaraskan upaya mereka menuju kawasan yang tangguh terhadap iklim (ASEAN Secretariat 2021a). Selain itu laporan ini juga dapat memberikan informasi terkait isu lingkungan kepada publik dan para pembuat kebijakan agar dapat meningkatkan kesadaran dan memberikan bantuan informasi dalam hal lingkungan sehingga kebijakan yang diambil akan lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk negara, ASCCR juga memberikan pandangan keseluruhan mengenai dampak perubahan iklim dalam konteks kawasan ASEAN, serta memudahkan proses pengambilan keputusan untuk negara-negara anggota dan ASEAN itu sendiri (ASEAN Secretariat 2021a).

ASEAN Melalui ACV 2025 selaku Inisiator Lahirnya Platform Kolaborasi

Peran normatif terakhir dari ASEAN pada negara melalui ACV 2025 adalah menjadi inisiator terbentuknya *ASEAN Centre for Climate Change* (ACCC). Di bawah kepemimpinan Brunei Darussalam ASEAN membentuk ACCC. Pentingnya pusat ini adalah untuk menyatukan inisiatif negara-negara di ASEAN secara holistik sebagai satu ASEAN dalam menghadapi perubahan iklim yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ASEAN dan di luar ASEAN itu sendiri (ASEAN Secretariat 2021a). ACCC adalah bentuk implementasi dari upaya ASEAN untuk mengakselerasi penelitian dalam bidang perubahan iklim. Pusat penelitian ini diharapkan dapat menjadi penghubung antara penelitian, data-data saintifik, dan peningkatan kapasitas dalam hal perubahan iklim (ASEAN Secretariat 2021a).

Melalui ACCC yang diketuai oleh Brunei Darussalam, pusat perubahan iklim di ASEAN ini berhasil mengumpulkan dana sebesar 4,7 miliar rupiah untuk membantu pembiayaan iklim di kawasan melalui ACCC dari partner-partner dialog seperti Selandia Baru dan Inggris. Kerja sama dengan Inggris juga menghasilkan perjanjian untuk mengirimkan tenaga-tenaga ahli untuk membantu Brunei Darussalam dalam mengembangkan ACCC (Climate Change Secretariat Brunei Darussalam, t.t.).

Evaluasi Peran Normatif ASEAN pada Negara (Anggota)

Upaya ASEAN dalam mitigasi perubahan iklim melalui ACV 2025 menunjukkan pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan berbasis kolaborasi regional. Keunggulan utamanya terletak pada struktur kelembagaan yang kuat dan terkoordinasi antara AMME, ASOEN, dan AWGCC, yang memungkinkan integrasi antara level kebijakan, teknis, dan implementatif. ASEAN berhasil merancang dokumen strategis seperti ASPEN 2016–2025 dan AWGCC Action Plan 2019–2025, yang secara spesifik mengatur berbagai sektor prioritas mulai dari adaptasi perubahan iklim, asesmen NDC, pemodelan iklim, hingga pembiayaan iklim dan transfer teknologi. ASEAN juga menonjol dalam pembangunan kapasitas negara anggota melalui pelatihan teknis, lokakarya, dan program berbasis bukti seperti SEACAM dan ARCDAP, yang memperkuat fondasi ilmiah kawasan. Selain itu, keberhasilan dalam mendorong negara-negara anggota memperbarui komitmen iklim melalui NDC menunjukkan peningkatan kesadaran kolektif dan political will kawasan dalam menghadapi krisis iklim. Upaya mobilisasi pendanaan iklim yang telah mengumpulkan miliaran rupiah serta dorongan kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga internasional menambah nilai penting dari upaya ASEAN dalam membangun ketahanan iklim regional yang berkelanjutan di dalam payung ACV 2025 itu sendiri. Keseluruhan inisiatif ini mencerminkan kapasitas ASEAN sebagai organisasi internasional yang mampu menjalankan fungsi normatif dan pengembangan kapasitas secara efektif dalam konteks perubahan iklim.

Meskipun begitu, terdapat beberapa elemen internal dalam upaya tersebut yang justru berpotensi melemahkan efektivitasnya. Pertama, sebagian besar inisiatif ASEAN bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum. Misalnya, meskipun terdapat mekanisme seperti AWGCC belum ada mekanisme sanksi atau kepatuhan yang kuat terhadap negara-negara anggota yang tidak memenuhi komitmen atau kontribusi yang telah disepakati. Ini menjadikan upaya mitigasi sangat bergantung pada *political will* masing-masing negara.

Kedua, banyak upaya yang berfokus pada pembangunan platform informasi dan peningkatan kapasitas teknis, seperti melalui pelatihan kebijakan iklim, namun hasil konkret dalam bentuk kebijakan nasional yang berubah secara substansial masih belum terlihat merata. Ini menandakan adanya kesenjangan antara *knowledge production* dan *policy action*—isu yang sering muncul dalam kerangka kerja sama regional berbasis data.

Ketiga, meskipun ASEAN menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan integratif, koordinasi lintas sektor dan antar-badan dalam ASEAN sendiri masih lemah. Contohnya, isu perubahan iklim belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kebijakan ekonomi, perdagangan, atau kesehatan di seluruh pilar ASEAN. Akibatnya, potensi pendekatan sistemik belum sepenuhnya dimanfaatkan, dan upaya mitigasi iklim masih sering berdiri sendiri tanpa dukungan lintas sektor yang sinergis.

Tentunya evaluasi ini tidak bersifat absolut apalagi ia didasarkan hanya pada tahap pertama implementasi ACV 2025 (2016-2020). Sehingga, masih banyak ruang improvisasi yang dapat dilakukan oleh ASEAN untuk memperbaiki kelemahan tersebut, termasuk peneliti sendiri dalam melanjutkan penelitian ini pada tahap selanjutnya.

Kesimpulan

ASEAN, melalui ACV 2025, memperkuat peran normatifnya dalam mitigasi perubahan iklim di tingkat negara anggota. Dengan pendekatan lintas pilar dan kerja sama melalui entitas seperti AMME, ASOEN, dan AWGCC, ASEAN merancang strategi kolektif seperti ASPEN dan AWGCC Action Plan 2019–2025. Strategi ini mencakup adaptasi, pengurangan emisi, pendanaan iklim, dan transfer teknologi, sambil menyesuaikan kebutuhan tiap negara anggota. ASEAN juga mendorong pembaruan komitmen NDC dan pengembangan kapasitas dalam pemodelan iklim, sistem peringatan dini, serta metodologi pelaporan emisi. Meski terdapat peningkatan komitmen negara anggota terhadap Paris Agreement, kesenjangan masih terjadi antara ambisi dan kapasitas. Pembiayaan iklim menjadi tantangan besar, namun ASEAN telah menghimpun lebih dari 3,95 miliar dolar AS, terutama untuk sektor energi. Kolaborasi dengan sektor swasta turut diperkuat guna mendukung pembangunan rendah karbon dan praktik berkelanjutan. Upaya ini menunjukkan ASEAN sebagai arsitek kebijakan iklim regional yang berfokus pada koordinasi, penguatan kapasitas, dan integrasi strategi lintas sektor.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dengan dana hibahnya (BLU 2024) penelitian ini dapat terlaksana.

Daftar Pustaka

Buku

Archer, Clive, 2001. *International Organizations*. New York: Routledge

Jacobson, Harold K., 1979. "Networks of Interdependence: International Organizations and The Global Political System". Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Mingst, Karen A., dan Ivan M. Arreguín-Toft, 2016. *Essentials of International Relations*. New York City: W.W. Norton.

Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021. *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis*. Cambridge: Cambridge University Press.

Artikel Jurnal

Kaewkhunok, Suppawit, 2023. "ASEAN Possibilities to Address Loss and Damage from Climate Change: Lessons from ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution", *Journal of Political and Social Agenda* 2(1): 13.

Tran, Thao L., et al., 2022. "A 50-Year Tropical Cyclone Exposure Climatology in Southeast Asia", *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 127(4).

Tyukavina, Alexandra, et al., 2022. "Global Trends of Forest Loss Due to Fire From 2001 to 2019", *Frontiers in Remote Sensing*, 3.

Qiu, Jiahui et al., 2024. "Examining Climate Ambition Enhancement in ASEAN Countries Nationally Determined Contributions", *Environmental Development* 49: 1.

Working Paper

Eckstein, David, et al., 2016. "Global Climate Risk Index 2018. Who Suffers Most From Extreme Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2016 and 1997 to 2016", *German Watch*, No. 13, 1 November.

International Energy Agency, 2019. "Southeast Asia Energy Outlook 2019", *World Energy Outlook Special Report*, No. 4, Oktober.

The Climate Change Response Framework, 2019. "Climate Impacts - Southeast", *Adaptation Workbook Northern Institute of Applied Climate Science*.

Publikasi dan Dokumen Resmi

ASEAN Secretariat, 2018. "ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 24th Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP24)" [Online]. Tersedia dalam <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/Adopted-AJSCC-to-COP24.pdf> [diakses pada 2 Juli 2024].

ASEAN Secretariat, 2019. "Revised AWGCC Action Plan (2019 2025)" [Online]. Tersedia dalam https://environment.asean.org/public/uploads/working_groups/20220627-1.-AWGCC-Action-Plan.pdf [diakses pada 2 Juli 2024].

ASEAN Secretariat, 2020. "ASEAN Cooperation on Environment-At A Glance" [Online]. Tersedia dalam [https://environment.asean.org/public/uploads/repositories/20230522-ASEAN-Cooperation-on-Environment-At-A-Glance-\(2020\).pdf](https://environment.asean.org/public/uploads/repositories/20230522-ASEAN-Cooperation-on-Environment-At-A-Glance-(2020).pdf) [diakses pada 2 Juli 2024].

ASEAN Secretariat, 2021a. "ASEAN State of Climate Change Report" [Online]. Tersedia dalam https://asean.org/wp-content/uploads/2021/10/ASCCR-e-publication-Correction_8-June.pdf [diakses pada 2 Juli 2024].

Asian Development Bank, 2009. "The Economics of Climate Change in Southeast Asia: A Regional Review" [Online]. Tersedia dalam <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29657/economics-climate-change-se-asia.pdf> [diakses pada 2 Juli 2024].

Brunei Darussalam National Council on Climate Change, n.d. "Brunei Darussalam Regional Commitment Under ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC)" [Online]. Tersedia dalam https://www.giz.de/en/downloads_els/03.%20ACCC%20Brunei%20Darussalam.pdf [diakses pada 17 Oktober 2024].

United Nations Framework Convention on Climate Change, 1997. "Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change" [Online]. Tersedia dalam <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf> [diakses pada 2 Juli 2024].

United Nations Framework Convention on Climate Change, 2015. "Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change" [Online]. Tersedia dalam https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf [diakses pada 2 Juli 2024].

Website Resmi

ASEAN Centre for Energy, n.d. "Introduction" [Online]. Tersedia dalam <https://aseanenergy.org/about/introduction/> [diakses pada 17 November 2024].

ASEAN Climate Change and Energy Project, n.d. "ASEAN Climate Change and Energy Project: Phase 1 (ACCEPT)" [Online]. Tersedia dalam <https://accept.aseanenergy.org/about/project/accept-phase-1/> [diakses pada 17 November 2024].

ASEAN Secretariat, (n.d.). *Haze*. ASEAN. <https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/haze-2/>

ASEAN Secretariat, 2016. "ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025. ASEAN Secretariat" [Online]. Tersedia dalam <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2012/05/8.-March-2016-ASCC-Blueprint-2025.pdf> [diakses pada 17 November 2024].

ASEAN Secretariat, 2019. "ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC) Action Plan 2019–2025" [Online]. Tersedia dalam <https://environment.asean.org> [diakses pada 17 November 2024].

ASEAN Secretariat, 2020. "ASEAN Cooperation on Environment" [Online]. Tersedia dalam [https://environment.asean.org/public/uploads/repositories/20230522-ASEAN-Cooperation-on-Environment-At-A-Glance-\(2020\).pdf](https://environment.asean.org/public/uploads/repositories/20230522-ASEAN-Cooperation-on-Environment-At-A-Glance-(2020).pdf). [diakses pada 17 November 2024].

ASEAN Secretariat, 2021. "ASEAN State of Climate Change Report: Current Status and Outlook of the ASEAN Region Toward the ASEAN Climate Vision 2050" [Online]. Tersedia dalam https://asean.org/wp-content/uploads/2021/10/ASCCR-e-publication-Correction_8-June.pdf [diakses pada 17 November 2024].

ASEAN Secretariat, 2021b. "ASEAN commemorates ASEAN Youth in Climate Action and Disaster Resilience Day 2021 with intergenerational dialogue" [Online]. Tersedia dalam <https://asean.org/asean-commemorates-asean-youth-in-climate-action-and-disaster-resilience-day-2021-with-intergenerational-dialogue/> [diakses pada 17 November 2024]

Artikel Daring

- Arino, Yosuke, dan S.V.R.K. Prabhakar, 2021. "What's in ASEAN's First State of Climate Change Report?" [Online]. Dalam <https://thediplomat.com/2021/10/whats-in-aseans-first-state-of-climate-change-report/> [diakses pada 17 November 2024]
- Centre for Climate Research Singapore & UK Met Office Hadley Centre, 2011. "*Southeast Asia Climate Analysis and Modelling (SEACAM)*" [Online]. Dalam <https://ccrs.weather.gov.sg> [diakses pada 17 November 2024]
- Centre for Climate Research Singapore, 2018. "ASEAN Regional Climate Data, Analysis and Projections (ARCDAP) Workshops" [Online]. Dalam <https://ccrs.weather.gov.sg> [diakses pada 17 November 2024]
- Centre for Climate Research Singapore, 2019. "*Weather Prediction by Numerical Methods (WPNM) Training Modules*" [Online]. Dalam <https://ccrs.weather.gov.sg> [diakses pada 17 November 2024]
- Climate Change Secretariat Brunei Darussalam, 2023. "Brunei Darussalam's Regional Commitment under ASEAN Working group on Climate Change (AWGCC)" [Online]. Dalam <https://climatechange.gov.bn/SitePages/Pages/association-of-southeast-asian-nations.aspx> [diakses pada 2 Juli 2024]
- International Institute for Sustainable Development (IISD), 2010. "ASEAN Environment Ministers Discuss Climate Negotiations" [Online]. Dalam <https://sdg.iisd.org/news/asean-environment-ministers-discuss-climate-negotiations> [diakses pada 15 Juni 2024]
- Japan International Cooperation Agency, 2019. "*ASEAN Climate Change Partnership Conference 2019 in Thailand*" [Online]. Dalam <https://www.jica.go.jp> [diakses pada 2 Juli 2024].
- Lindsey, Rebecca. 2023. "Climate Change: Global Sea Level" [Online]. Dalam <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level> [diakses pada 2 Juli 2024].
- Lindsey, Rebecca, dan Luann Dahlman, 2024. "Climate Change: Global Temperature." National Oceanic and Atmospheric Administration" [Online]. Dalam <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature> [diakses pada 17 Oktober 2024].

- MacCarthy, James et al., 2024. "The Latest Data Confirms: Forest Fires Are Getting Worse." World Resource Institute" [Online]. Dalam <https://www.wri.org/insights/global-trends-forest-fires> [diakses pada 17 Oktober 2024].
- Ministry of Foreign Affairs, Malaysia. (n.d.). "FAQs on ASEAN 2025: Forging Ahead Together" [Online]. Dalam https://www.kln.gov.my/web/are_dubai/home/-/blogs/faqs-on-asean-2025-%3A-forging-ahead-together [diakses pada 17 Oktober 2024].
- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). (n.d.). "*Climate change: Global sea level*" [Online]. Dalam <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level> [diakses pada 17 Oktober 2024].
- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). (n.d.). "*Climate change: Global temperature*" [Online]. Dalam <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature> [diakses pada 17 Oktober 2024].
- United Nations Development Programme, 2023. "What are NDCs and How do They Drive Climate Action?", Climate Promise" [Online]. Dalam <https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/NDCs-nationally-determined-contributions-climate-change-what-you-need-to-know> [diakses pada 26 Juni 2024].
- World Economic Forum. 2021. "Southeast Asia faces extreme weather due to global warming by 2030" [Online]. Dalam <https://www.weforum.org/stories/2021/08/southeast-asi-weather-extremes-global-warming-2030-ipcc-report/> [diakses pada 17 Oktober 2024].
- World Weather Attribution. 2023. "Extreme Humid Heat in South Asia in April 2023, Largely Driven by Climate Change, Detrimental to Vulnerable and Disadvantaged Communities" [Online]. Dalam <https://www.worldweatherattribution.org/extreme-humid-heat-in-south-asia-in-april-2023-largely-driven-by-climate-change-detrimental-to-vulnerable-and-disadvantaged-communities/> [diakses pada 21 November 2024].